

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

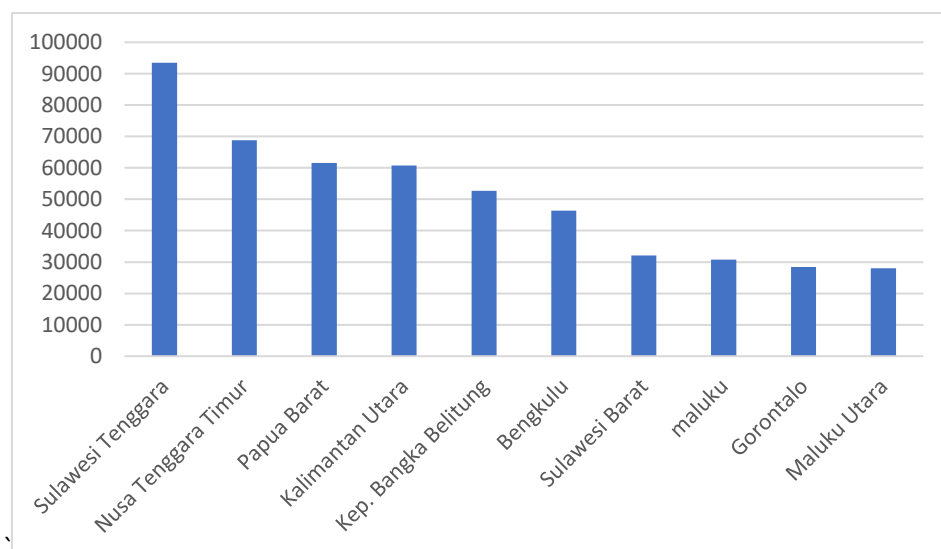
Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian penting ketika melaksanakan pembangunan di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan dari kegiatan ekonomi sehingga barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah oleh karena itu tingkat pendapatan juga menjadi naik dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai (Mariana Naibaho & Nabila, 2021). Adanya pembangunan ekonomi ini memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara umum sehingga pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila terciptanya pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB sendiri merupakan ukuran ekonomi yang menunjukkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh semua sektor perekonomian di suatu daerah selama periode tertentu dan mencakup nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tersebut dan hal itu digunakan sebagai indikator untuk melakukan evaluasi kinerja ekonomi dan merencanakan kebijakan pembangunan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat mencirikan kapabilitas daerah dalam mengatur sumber daya yang dimiliki sehingga jumlah dari PDRB yang dihasilkan dari tiap daerah bergantung terhadap potensi faktor produksi yang dimiliki setiap daerahnya. Oleh karena itu, ketersediaan faktor-faktor produksi yang berbeda tiap daerahnya menyebabkan variasi dalam besaran PDRB di setiap daerah (Solin et al., 2023).

Kemampuan untuk meningkatkan nilai tambah ini dapat ditunjang oleh pengadaan faktor produksi. Pengadaan faktor produksi dapat diperoleh melalui adanya investasi. Investasi sendiri bisa didapatkan melalui pemerintah dan swasta (masyarakat), serta pinjaman luar negeri dan investasi swasta asing (Sukirno, 2004). Investasi berdasarkan teori ekonomi digunakan sebagai pengeluaran guna membeli barang-barang modal dan peralatan produksi kemudian digunakan untuk mengganti dan menambah barang di masa yang akan datang. Berdasarkan teori ekonomi neoklasik yang dimukakan oleh Harrod Domar yang menyatakan bahwa dibutuhkannya adanya pembentukan modal (investasi) untuk menuju ekonomi yang matang.

Berikut disampaikan merupakan gambaran mengenai provinsi yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).



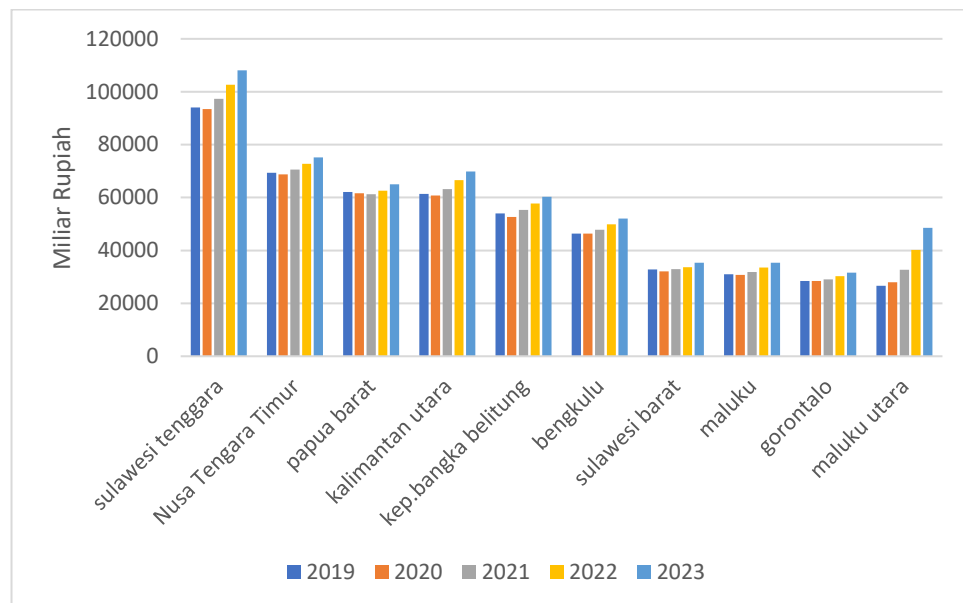
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah kembali)

Gambar 1. 1

PDRB Pada 10 Provinsi di Indonesia Tahun 2020 (Miliar Rupiah)

Berdasarkan Gambar 1.1 dari data Badan Pusat Statistik pada 2020 Provinsi Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Sulawesi Barat, Maluku, Gorontalo, Maluku Utara menjadi provinsi yang menempati posisi bawah nilai PDRB di Indonesia hal ini karena sebagian besar dari wilayah ini masih sangat bergantung pada sektor-sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan yang memiliki nilai tambah rendah dan rentan terhadap fluktuasi harga global. Selain itu, sektor industri pengolahan belum berkembang secara signifikan, sehingga hilirisasi hasil sumber daya alam belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal. Keterbatasan infrastruktur transportasi, energi, dan digital juga menjadi hambatan besar dalam memperluas konektivitas dan distribusi barang serta jasa. Wilayah-wilayah ini umumnya memiliki jumlah penduduk yang relatif kecil dan tingkat urbanisasi yang rendah, sehingga aktivitas ekonomi tidak terpusat.

Berdasarkan siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, meskipun sempat dilanda oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari pandemi Covid-19 namun, kegiatan ekonomi domestik masih dapat tumbuh pada kondisi global yang masih belum stabil, dan guna memahami sejauh mana kontribusi dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator untuk mengukur aktivitas ekonomi pada sepuluh provinsi dengan nilai produk domestik regional bruto yang menempati posisi bawah di Indonesia dapat dilihat berdasarkan grafik 1.2 berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah kembali)

Gambar 1. 2

Produk Domestik Regional Bruto 10 Provinsi di Indonesia

(Miliar Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.2 diketahui bahwa nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada rentang waktu 2019 hingga 2023 di Provinsi Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Sulawesi Barat, Maluku, Gorontalo, Maluku Utara. Jika dilihat dari grafik di atas maka nilai produk domestik regional bruto didominasi dengan keadaan adanya penurunan pada 2020. Seperti pada Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2019 senilai 94.053,52 miliar rupiah menurun menjadi 93.445,72 miliar rupiah pada tahun 2020 barulah kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 97.275,32. Namun, pada ke sepuluh provinsi tersebut pada 2021 kembali mengalami kenaikan.

Hal tersebut dapat terjadi diakibatkan oleh adanya pandemi covid-19 yang melanda seluruh negeri sehingga kegiatan ekonomi untuk menunjang

pertumbuhan ekonomi dengan PDRB menjadi lumpuh dikarenakan terdapat beberapa aturan pemerintah yang mewajibkan masyarakat untuk tetap melakukan batasan seperti kebijakan PSBB/PPKM membatasi mobilitas Masyarakat kemudian banyak usaha dan pekerja yang gulung tikar dan di-PHK sehingga pendapatan masyarakat menjadi berkurang yang mengakibatkan daya beli dan konsumsi masyarakat menjadi berkurang oleh karena itu, sektor usaha dan produsen mengurangi jumlah produksi .

Investasi menjadi salah satu elemen kunci dalam memengaruhi pendapatan nasional karena investasi memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan adanya investasi maka masyarakat dapat terus mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi, menciptakan lebih banyak peluang kerja untuk masyarakat yang dampaknya terhadap kenaikan pendapatan di rumah tangga sehingga pada akhirnya akan menciptakan konsumsi masyarakat dan memperkuat daya beli, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan (Sukirno, 2000).

Foreign Direct Investment (FDI) memiliki peran yang cukup krusial karena FDI dapat menggambarkan aliran investasi modal asing untuk masuk kedalam negeri lebih dari pada itu *foreign direct investment* berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi. Dengan demikian, FDI menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong kemajuan dan daya saing suatu negara di kancah global. Berikut ini disajikan tabel dari *Foreign Direct Investment* (FDI) pada 10 provinsi di Indonesia:

Tabel 1. 1
Foreign Direct Investment (FDI) 10 Provinsi di Indonesia
(Juta USD)

Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023
Sulawesi Tenggara	987,7	1268,6	1616,5	877,9	448,3
Nusa Tenggara Timur	126,8	81,3	79	73,3	124,3
Papua Barat	46,2	10,6	32,5	71,8	28,8
Kalimantan Utara	81,7	68,4	745,2	1266,2	1332,7
Kep.Bangka Belitung	88,7	48,4	44,7	129,7	72,5
Bengkulu	144,8	192,3	23,7	52,2	76,1
Maluku	33	176,7	13,3	73,4	106,3
Sulawesi Barat	10,1	6,5	5,9	28,3	24,3
Gorontalo	987,7	1268,6	1616,5	877,9	448,3
Maluku Utara	1008,5	2409	2819,9	4487,5	4998,2

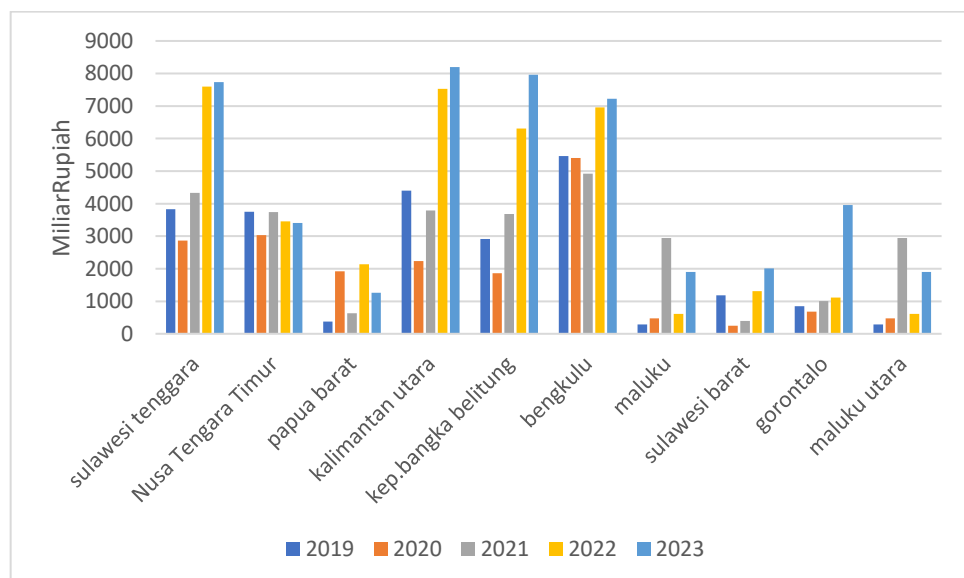
Sumber: Badan Pusat Statistik(BPS)

Berdasarkan tabel 1.1 dalam rentang waktu 2019 hingga 2023 pada ke 10 provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Sulawesi Barat, Maluku, Gorontalo, Maluku Utara. Dimana sebagian besar dari pendanaan langsung dari luar negeri ini memiliki angka yang cukup kecil dan berfluktuatif.

Pada Provinsi Sulawesi Tenggara Nilai FDI mengalami kenaikan hingga tahun 2021 sebesar 1.616,5 juta USD yang kemudian di mengaalami penurunan hingga 2023 menjadi 448,3 juta USD, pada Provinsi Nusa Tenggara Timur nilai FDI di 2019 sejumlah 126,8 juta USD mengalami penurunan di 2020 hingga 2022 menjadi 73,3 juta USD baru kembali naik di 2023 menjadi 124,3 juta USD.

Dengan adanya investasi yang berasal dari FDI dapat menjadi salah satu modal untuk dapat membangun pertumbuhan ekonomi hal ini karena dengan adanya FDI diharapkan dapat memiliki kemampuan guna meningkatkan produktivitas yang hasilnya dapat mempengaruhi peningkatan aktivitas ekonomi.

Kemudian investasi yang berasal dari dalam negeri yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan sumber pendanaan yang berasal dari domestik menjadi salah satu sumber guna mendorong adanya pertumbuhan dari produk domestik regional bruto. Penanaman modal dalam negeri ini dapat mewujudkan permintaan yang efektif dan menciptakan efisiensi untuk proses produksi di masa yang akan datang, berikut merupakan disajikan dalam gambar 1.3 yang merupakan penanaman modal dalam negeri pada 10 provinsi di Indonesia.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah kembali)

Gambar 1.3

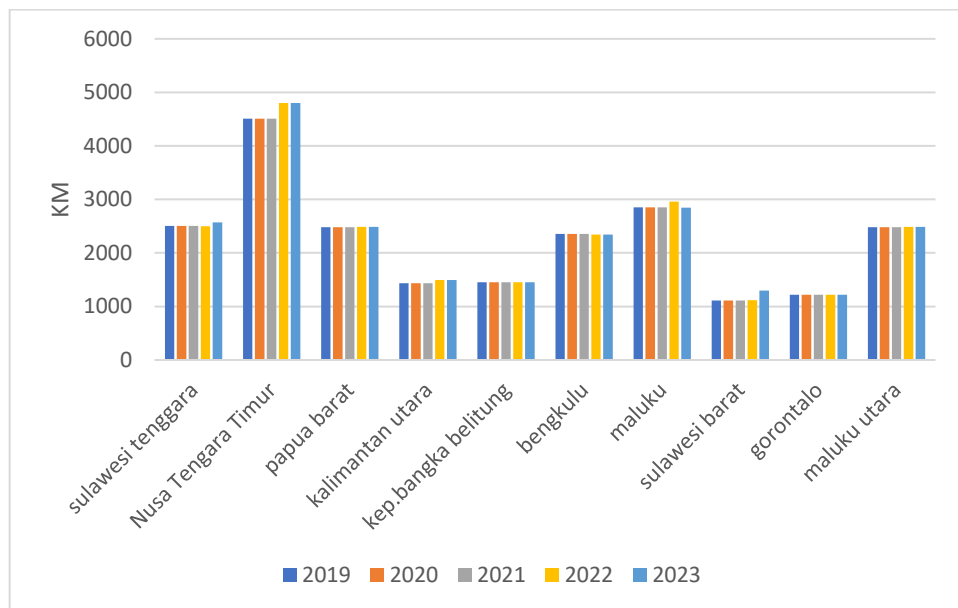
Penanaman Modal Dalam Negeri 10 Provinsi di Indonesia (miliar rupiah)

Berdasarkan gambar 1.3 dalam rentang waktu 2019 hingga 2023 penanaman modal dalam negeri Provinsi Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Sulawesi Barat, Maluku, Gorontalo, Maluku Utara mengalami pergerakan yang fluktuatif yang didominasi terjadinya penurunan nilai penanaman modal dalam negeri pada tahun 2020 di 10 provinsi tersebut.

Provinsi yang memiliki nilai cukup fluktuasi paling tinggi ada pada provinsi Provinsi Kalimantan Utara nilai PMDN mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020 menjadi 2.235,2 miliar rupiah dari pada tahun 2019 dengan jumlah PMDN sebanyak 4.400,9 miliar rupiah yang baru lah kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 hingga 2023. Namun, pada tahun 2023 di setiap provinsi ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan diharapkan kenaikan ini dapat terjadi secara terus-menerus di tahun-tahun berikutnya.

Dengan peningkatan penanaman modal dalam negeri sendiri dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sehingga meningkatkan pendapatan perkapita dari masyarakat dan menciptakan peningkatan konsumsi masyarakat hal ini dapat mendorong perkembangan sektor industri dan pertumbuhan ekonomi dapat tercipta.

Kemudian peningkatan PDRB dapat dipengaruhi pula oleh infrastruktur jalan, infrastruktur jalan memiliki peranan penting dalam memastikan kelancaran kegiatan ekonomi karena dengan infrastruktur jalan yang baik maka akan meningkatkan aktivitas ekonomi.



Sumber: Badan Pusat Statistik(diolah kembali)

Gambar 1. 4

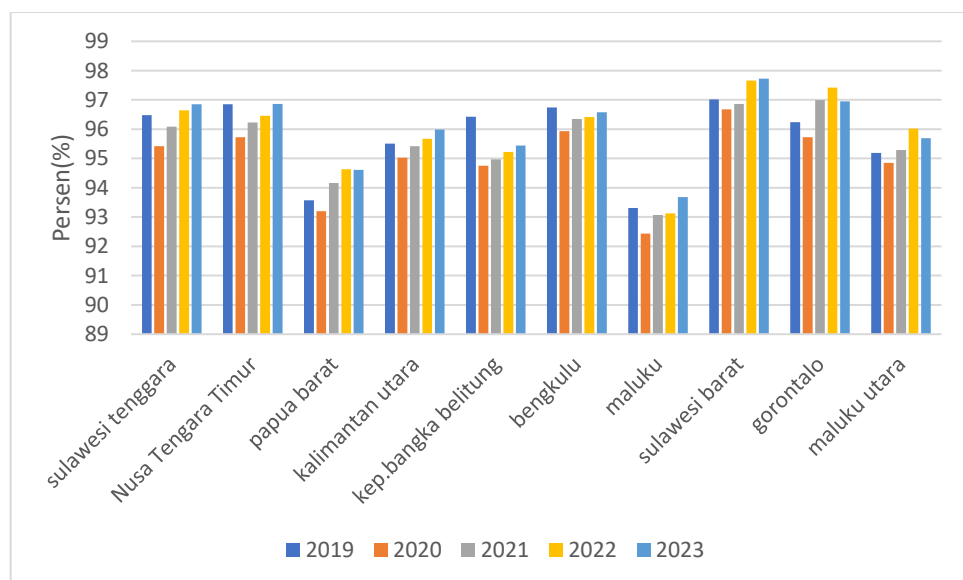
Infrastruktur Panjang Jalan 10 Provinsi di Indonesia (KM)

Pada tahun 2019 hingga 2020 infrastruktur jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Sulawesi Barat, Maluku, Gorontalo, Maluku Utara cukup stabil walaupun terdapat beberapa perubahan seperti pada Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat kenaikan pada tahun 2022 menjadi 4.803 KM, kemudian di Provinsi Maluku terjadi kenaikan pada tahun 2022 menjadi 2.959 KM dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 2.847 KM.

Infrastruktur jalan memberikan kontribusi untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi karena infrastruktur jalan merupakan infrastruktur dasar guna menghubungkan setiap wilayahnya dan memberikan akses untuk mobilitas barang, jasa dan aktivitas masyarakat setiap harinya. Maka dengan ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dapat menekan biaya transportasi, kemudian

mempercepat distribusi barang serta mengefisienkan rantai pasok. Dengan infrastruktur jalan yang baik maka akan menarik investasi untuk datang karena, investor cenderung akan menanamkan modalnya pada daerah yang memiliki aksesibilitas yang mudah untuk mendukung kegiatan operasional bisnisnya. Oleh karena itu, infrastruktur jalan dapat memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak pada peningkatan PDRB.

Faktor lainnya adalah tenaga kerja, Keterlibatan penduduk dalam pasar kerja tidak hanya mencerminkan kondisi sosial-ekonomi, tetapi juga memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja, semakin besar potensi tenaga produktif yang dapat mendukung penciptaan barang dan jasa, yang pada akhirnya tercermin dalam peningkatan PDRB.



Sumber: Badan Pusat Statistik(diolah kembali)

Gambar 1. 5

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada 10 Provinsi di Indonesia
(persen)**

Jika dilihat dari gambar di atas tingkat partisipasi angkatan kerja pada rentang waktu 2019 hingga 2023 di Provinsi Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Maluku, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Gorontalo cukup berfluktuatif dan serentak mengalami penurunan pada tahun 2020 hal ini bukan tanpa alasan dikarenakan pada tahun tersebut terjadi pandemi Covid-19 yang mana akibatnya banyak tenaga kerja yang mengalami PHK sehingga terpaksa harus dirumahkan.

Provinsi yang memiliki penurunan cukup drastis ada apa provinsi Sulawesi Tenggara terdapat penurunan jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja dari 2019 dengan nilai 96,48% dari menjadi 95,42% dan baru kembali mengalami kenaikan pada tahun-tahun selanjutnya, begitupun dengan provinsi-provinsi yang lainnya, dimana pada Provinsi Nusa Tenggara Timur TPAK menurun dari tahun 2019 dengan nilai 96,85% menurun menjadi 95,72%, dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TPAK memiliki penurunan yang paling besar dari tahun 2019 dengan nilai 96,42% menjadi 94,75% pada 2020.

Tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian di suatu daerah dikarenakan tenaga kerja merupakan bagian dari faktor produksi yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai PDRB dengan keterampilan dan produktivitas yang dimiliki oleh tenaga kerja.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Basalama, 2024) yang meneliti tentang Pengaruh Investasi Pma Dan Pmdn Terhadap Produk Domestik

Regional Bruto Di Provinsi Jawa Barat Pada Triwulan Tahun 2017-2023 memiliki hasil bahwa Hasilnya menunjukkan bahwa investasi FDI dan GDI memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB Jawa Barat.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Nurilmih et al., 2023) yang meneliti mengenai Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal dalam Negeri, dan Belanja Modal terhadap Industri Pengolahan dan Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sulawesi Selatan Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan, belanja modal positif dan signifikan terhadap industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan, PMA positif dan tidak signifikan terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan, dapat meningkatkan pengaruh industri pengolahan dan peningkatan PDRB.

Maka berdasarkan dari fenomena dan *gap research* tersebut sehingga terdapat urgensi untuk melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji ulang dan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Foreign Direct Investment ,Penanaman Modal Dalam Negeri, Infrastruktur Jalan, Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Pada 10 Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, sehingga identifikasi masalah penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *foreign direct investment*, penanaman modal dalam negeri, infrastruktur jalan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja secara parsial terhadap produk domestik regional bruto pada 10 provinsi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *foreign direct investment*, penanaman modal dalam negeri, infrastruktur jalan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja secara simultan terhadap produk domestik regional bruto pada 10 provinsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, oleh karena itu penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *foreign direct investment*, penanaman modal dalam negeri, infrastruktur jalan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja secara parsial terhadap produk domestik regional bruto pada 10 provinsi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *foreign direct investment*, penanaman modal dalam negeri, infrastruktur jalan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja secara simultan terhadap produk domestik regional bruto pada 10 provinsi di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Bagi Penulis

Dengan dilaksanakannya penulisan ini maka penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang dipelajari selama berkuliah terutama yang

berkaitan dengan *foreign direct investment*, penanaman modal dalam negeri, infrastruktur jalan, tingkat partisipasi angkatan kerja dan produk domestik regional bruto. Selain itu, penulis juga dapat menggali potensi dan mendapatkan pengalaman berharga dalam melaksanakan penelitian, mengasah kemampuan analisis data dan penulisan serta mempresentasikan hasil penelitian yang dilakukan.

1.4.2 Kegunaan Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat menggunakan hasil dari penelitian ini untuk mendapatkan informasi mengenai pengaruh *foreign direct investment*, penanaman modal dalam negeri, infrastruktur jalan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap produk domestik regional bruto yang ada pada 10 provinsi terpilih, yang kemudian yang menjadi temuan dari penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk dijadikan rujukan dalam merumuskan kebijakan agar lebih efektif

1.4.3 Kegunaan Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan meningkatkan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat mengenai berbagai potensi yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing sehingga dapat dimanfaatkan guna meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

1.4.4 Kegunaan Praktis

Penelitian yang dilakukan ini dapat digunakan mengembangkan strategi penggalan potensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

